KOTA BEKASI, Prolite – Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bekasi, Rizki Topananda menyoroti persoalan Rotasi dan mutasi pejabat yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.

Ia menegaskan, proses tersebut merupakan kewenangan penuh eksekutif, namun tetap berada dalam pengawasan legislatif.

Menurut Rizki, DPRD khususnya Komisi I memiliki fungsi kontrol untuk memastikan kebijakan kepegawaian itu berjalan sesuai aturan.

Baca Juga:KUA-PPAS 2027 Disepakati, DPRD dan Pemkot Bekasi Kunci APBD Rp6,7 Triliun, Banggar Soroti Pajak, Belanja Pegawai hingga Kinerja BUMD

Pengawasan dilakukan bukan pada keputusan personalnya, melainkan pada prosedur dan dampaknya terhadap kinerja pemerintahan.

“Rotasi dan mutasi memang momen sepenuhnya eksekutif. Tetapi DPRD sebagai mitra pemerintah tetap memantau dan mengawasi apakah prosesnya sudah sesuai regulasi,” kata Rizki, saat dimintai keterangan langsung.

Rizki mengakui, informasi awal mengenai rotasi-mutasi tersebut justru diperoleh dari pemberitaan di media saja.

Baca Juga:DPRD Kota Bekasi Gelar Sosialisasi Raperda, Libatkan Masyarakat dalam Penyusunan Regulasi yang Berkualitas

“Sejauh ini saya mengetahuinya dari media. Karena itu fungsi pengawasan tetap berjalan, memastikan prosesnya sesuai aturan dan hasilnya bisa dirasakan masyarakat,” cetusnya.

DPRD: Rotasi Mutasi Hak Eksekutif, Diawasi Oleh Legislatif

Baca Selanjutnya
DPRD Dukung Penguatan Koperasi dan UMKM di Kota Bekasi